



# **LAPORAN**

## **KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA**

**TANGGAL 19 NOVEMBER 2020  
SAMPAI DENGAN  
TANGGAL 21 NOVEMBER 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, NOVEMBER 2020**



## **LAPORAN**

### **KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI SUMATERA UTARA PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021 TANGGAL 19 – 21 NOVEMBER 2020**

---

#### **I. PENDAHULUAN**

Konstitusi UUD RI tahun 1945 mengamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tuntutan kehidupan masyarakat terutama dalam menjawab kebutuhan Sumber Daya Manusia di era globalisasi.

Perjuangan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan terkait upaya pengembangan Kesempatan Kerja melalui Program Revitalisasi BLK menjadi Balai Pelatihan yang bertaraf internasional. Oleh sebab itu, kunjungan pengawasan Komisi IX DPR RI pada masa persidangan ini dilakukan untuk melihat penyelenggaraan BBPLK sebagai amanat dari undang-undang.

Sejak reformasi, peran BLK sampai sekarang masih memerlukan pengembangan dan peningkatan baik dari infrastruktur, modernisasi peralatan, serta penguatan tenaga instruktur sehingga dapat terus berinovasi dan kreatif dalam upaya mengakselerasi pembangunan SDM menjadi tenaga kerja berkualitas dan berkompeten. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI mendorong pengembangan BBPLK yang bertujuan menciptakan balai latihan kerja menjadi rumah kreatif bagi para anak-anak yang punya minat dan bakat.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengembangkan BBPLK menjadi pusat pengembangan kreativitas tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, perluasan orientasi pelatihan dan pengembangan serta uprading keahlian. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pada BBPLK ini bertujuan menyelaraskan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. Dari jumlah keseluruhan 303 BLK yang ada di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan pelatihan dan merevitalisasi sarana dan prasarannya. Dari 303 BLK tersebut, diketahui sepertiga dalam keadaan baik, sepertiga sedang, dan sepertiganya lagi dalam keadaan buruk.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan merupakan unit pelaksanaan teknis pusat dibidang pelatihan kerja dibawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. BBPLK Medan merupakan salah satu dari 5 BLK besar selain BBPLK Bekasi, Serang, Bandung dan BBPLK Semarang yang telah menerapkan program revitalisasi 3R (reorientasi, revitalisasi, dan rebranding) untuk memperkuat akses dan mutu pelatihan vokasi. BBPLK menyelenggarakan Pelatihan yang dibiayai Pemerintah dengan modul pelatihan bertaraf internasional. Harapannya agar masyarakat banyak yang mengikuti pelatihan di BBPLK dapat memiliki kompetensi yang cukup memadai menghadapi persaingan kerja di tengah masyarakat.

Begitu pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah terutama dalam menghadapi tuntutan jaman akan pentingnya upaya membangun SDM yang berkualitas, dalam menjawab kebutuhan industry yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024. Dimana akan dititikberatkan kepada peran BBPLK, sehingga perlu dikembangkan menuju Balai Pelatihan bertaraf Internasional. Oleh karena itu, dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 ini, Komisi IX DPR akan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik di samping ke Provinsi Sumatera Utara, juga ke Provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Barat.

Melalui kunjungan kerja spesifik ini diharapkan Komisi IX DPR RI akan mendapatkan berbagai informasi dan masukan terhadap penyelenggaraan program pengembangan BBPLK menuju Balai Pelatihan bertaraf Internasional yang selama ini sudah berjalan di provinsi Sumatera Utara sehingga dapat memberikan masukan dalam melakukan berbagai penyempurnaan dalam penyelenggaraan BBPLK yang dapat membentuk SDM yang berkualitas di masa mendatang.

## **II. GAMBARAN UMUM SUMATERA UTARA DAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA (BBPLK) MEDAN**

### **A. KONDISI KETENAGAKERJAAN DI SUMATERA UTARA**

Pada Februari 2019, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebesar 2,56 juta orang (36,50 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1,37 juta orang (19,48 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 1,26 juta orang (17,91 persen) dan berusaha sendiri sebesar 1,19 juta orang (16,97 persen). Penduduk yang bekerja di sector formal sebanyak 39,75 persen, yaitu penduduk bekerja yang status pekerjaan utamanya berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar dan yang statusnya buruh atau karyawan atau pegawai. Dan untuk sector informal sebanyak 60,25 persen.

Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Utara per Februari 2020 sebelum terjadinya pandemic covid-19 sebagai berikut: total penduduk usia kerja mencapai 10,132 juta, jumlah angkatan kerja sebanyak 7,295 juta yang terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 6,950 juta dan yang tidak bekerja sebanyak 345 ribu. Sementara bukan angkatan kerja sebanyak 2,837 juta yang terdiri dari penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak 1,553 juta, penduduk sekolah sebanyak 895 ribu dan lain lain sebanyak 389 ribu.

Sejak pandemic covid-19 merebak di tanah air, provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi penyumbang pekerja yang ter PHK dan dirumahkan akibat covid-19. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mencatat ada 14.000 pekerja yang tersebar di 283 Perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang Pariwisata paling terkena dampak oleh Covid-19 seperti perhotelan, biro-biro perjalanan dan usaha ritel seperti Plaza yang sesuai aturan Pemerintah bahwa Plaza-Plaza harus ditutup untuk memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19. Sementara jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sumatera Utara yang sudah dipulangkan sebanyak 5000 orang baik yang legal maupun ilegal dan akan bertambah sebanyak 2.200 orang pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020.

### **B. PROFILE BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA (BBPLK) MEDAN**

#### **1. Sejarah singkat BBPLK Medan**

BBPLK Medan merupakan UPT Pusat dibidang pengembangan dan perluasan kerja yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan RI. Bangunan megah BBPLK ini dibangun pada tahun 1971, di atas tanah sekitar +15 Ha, dan saat itu dikenal sebagai Pusat Pelatihan Kerja Kejuruan Industri (PLKI) dibawah koordinasi Kanwil Naker Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan

Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Kep. 1476/M/1974 tanggal 26 September 1974. Tahun 1997, perubahan tata kerja dari PLKI menjadi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dengan Keputusan Kep.Menakertrans Kep.88/MNE/199720 Mei 1997.

Seiring dengan perkembangan zaman dan menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih luas, BBPLK Medan berkembang dengan perubahan scope kerja, antara lain yaitu: Tahun 1974-1997, sebagai Pusat Pelatihan/Kejuruan Industri (PLKI) dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. Kep. 1476/M/1974 tanggal 26 September 1974, dibawah koordinasi Kanwil Nakertrans provinsi Sumatera Utara. Tahun 1997-2001, sebagai Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.88/MNE/1997 tanggal 20 Mei 1997, BLK Medan berubah nama menjadi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Medan, melekat pada tugas dan fungsi Ditjen Binapendagri Depnakertrans. Tahun 2001-2005, menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat di lingkungan kerja Ditjen Binapendagri, unit eselon III, berdasarkan Kepmenakertrans No. 137/MEN/2001 tanggal 25 Juli 2001 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Depnakertrans. Tahun 2006, BLKI Medan menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP), unit eselon II b di lingkungan kerja Binapendagri Depnakertrans, yang disebut Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) Medan, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi No. PER.06/MEN/III/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Depnakertrans.

## **2. Profile BBPLK Medan dan realisasi anggaran UPTD Binaan BBPLK Medan**

BBPLK Medan sudah berdiri selama 49 tahun dengan lahan seluas 8 ha, memiliki 19 Balai Pelatihan UPTD binaan, 12 BLK berada di Sumatera Utara dan 7 berada di Jambi, dan 47 BLK Komunitas dimana 27 BLK berada di Sumatera Utara dan 20 berada di Jambi. Alokasi anggaran UPTD Binaan BBPLK Medan dari sekitar Rp.15,5 miliar, realisasi terbesar ada pada BLK tebing Tinggi dimana dari anggaran yang ada sebesar Rp.894 juta, terealisasi sebesar Rp.329 juta atau 37 persen, diikuti UPT BLK Mandailing Natal dan BLK UPTD Tarutung yang masing-masing terealisasi sebesar 33 persen. Realisasi anggaran paling rendah adalah BLK Rimbo Bujang/Bungo hanya 2 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp.924 juta, diikuti BLK Lubuk Pakam sebesar 5 persen dari anggaran sebesar Rp.1,09 miliar, hanya terserap sebesar Rp.48,6 juta dan BLK UPTD Sidikalang yang hanya mampu terealisasi sebesar 6 persen dari total anggaran sebesar Rp.848 juta.

KAPASITAS LATIH	
<p><b>2019</b></p> <p>11.184 peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.240 pelatihan internal</li> <li>• 4.080 UPTD</li> <li>• 4.864 BLK Komunitas</li> </ul>	<p><b>2020</b></p> <p>11.184 peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.240 pelatihan internal</li> <li>• 4.080 UPTD</li> <li>• 4.864 BLK Komunitas</li> </ul>
<p><b>JENIS PELATIHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Berbasis Kompetensi</li> <li>• Pendidikan Dasar Instruktur</li> <li>• Upgrading / Upskilling</li> <li>• Pelatihan Asesor Kompetensi</li> <li>• Pelatihan Tenaga Pelatihan</li> </ul>	<p><b>MODEL PELATIHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non-Boarding</li> <li>• Boarding</li> <li>• Mobile Training Unit</li> <li>• Pelatihan Online</li> <li>• Hybrid Learning</li> </ul>

Target pelatihan tahun 2019-2020 sebanyak 12 ribu dimana 5.000 mendapatkan pelatihan di BBPLK, sementara sisanya dilatih di UPTD BLK binaan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan yaitu hanya 5.000, termasuk peserta pelatihan yang berasal dari provinsi lain yang mendapat pelatihan di BBPLK Medan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh BBPLK Medan. BBPLK Medan merupakan satu-satunya BLK milik pemerintah yang menjadi mitra pelaksana kartu prakerja yang ada 2 (dua) gelombang dimana pergelombang ada 2.500 orang penerima kartu prakerja yang mendapatkan pelatihan dari berbagai daerah.

PELATIHAN PRAKERJA DI BBPLK MEDAN	
Peserta: 2.504 orang (8 Program Pelatihan)	
<b>Peserta berasal dari 31 Provinsi di Indonesia</b>	
<p>Bali: 9</p> <p>Bangka Belitung: 7</p> <p>Banten: 27</p> <p>Bengkulu: 8</p> <p>DI Yogyakarta: 7</p> <p>DKI Jakarta: 88</p> <p>Gorontalo: 11</p> <p>Jambi: 14</p> <p>Jawa Barat: 106</p> <p>Jawa Tengah: 52</p> <p>Jawa Timur: 69</p> <p>Kalimantan Barat: 20</p> <p>Kalimantan Selatan: 15</p> <p>Kalimantan Tengah: 12</p> <p>Kalimantan Timur: 28</p> <p>Kalimantan Utara: 6</p> <p>Kepulauan Riau: 15</p> <p>Lampung: 11</p> <p>Maluku: 7</p>	<p>Nanggroe Aceh Darussalam (NAD): 37</p> <p>Nusa Tenggara Barat (NTB): 109</p> <p>Nusa Tenggara Timur (NTT): 32</p> <p>Riau: 23</p> <p>Sulawesi Barat: 1</p> <p>Sulawesi Selatan: 42</p> <p>Sulawesi Tengah: 7</p> <p>Sulawesi Tenggara: 8</p> <p>Sulawesi Utara: 17</p> <p>Sumatera Barat: 22</p> <p>Sumatera Selatan: 21</p> <p>Sumatera Utara: 974</p>



### 3. Fasilitas pendukung

BBPLK Medan memiliki areal (luas lahan) seluas 7,9 Ha, dan telah memiliki sertifikasi Hak Milik (SHM), dengan jumlah dan jenis bangunan sampai akhir tahun 2017 berupa gedung kantor, workshop, 2 buah asrama, gedung serba guna, perumahan bagi 52 orang pegawai, kantin, perpustakaan, masjid, 2 buah mess, Kios 3in1, lapangan bola dan lapangan tenis. Selain itu, dari segi dukungan SDM tenaga instruktur dan pegawai, BBPLK Medan memiliki 78 orang pegawai dan instruktur yang didominasi pendidikan sarjana sebanyak 43 orang diikuti pasca sarjana.

### 4. Kejuruan

BBPLK memiliki 2 kejuruan utama yaitu kejuruan pariwisata dan bangunan yang menjadi lingkup BBPLK Medan. Untuk kejuruan pariwisata, memiliki sub kejuruan antara lain Commercial Cookery Pelayanan Makanan dan Minuman, Barista, Front Office Receptionist, Room Attendant, Ticketing, Baker, Commercial Pastry, Tour Leader, Kepemanduan Wisata. Sub kejuruan ini berdasarkan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Penyedia Makanan dan Minuman Sub Sektor Restoran, Bar dan Jasa Boga Bidang Industri Jasa Boga Kep.318/MEN/IX/2007 dan Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Bidang Kepemanduan Wisata Kep.57/MEN/III/2009.

Untuk kejuruan bangunan sendiri, sub kejuruan didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2010 tentang pemberlakuan SKKNI Sektor Jasa Konstruksi. Sub kejuruan bangunan antara lain Juru Gambar Arsitektur, Cost Estimator, Juru

Ukur, Tukang Finishing Teknik Oles, Tukang Finishing Teknik Semprot, Cabinet Maker, Tukang Kayu.

#### **5. Kekuatan, kelemahan dan ancaman BBPLK Medan**

BBPLK medan yang telah berdiri sejak tahun 1975, telah memiliki Instruktur dan SDM dengan sertifikat dari dalam negeri dan luar negeri, memiliki Workshop pelatihan, alat dan mesin, instruktur modern dengan mendapat bantuan alokasi anggaran BBPLK Medan dari dana APBN. Selama ini telah memberikan pelatihan kepada masyarakat secara gratis pada sektor Bangunan dan Pariwisata dimana peserta Lulusan Pelatihan bersertifikat kompetensi dari BNSP. Selain itu, informasi terkait pelatihan dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh BBPLK dapat dilihat di website yang dapat diakses pihak luar. Dalam upaya menyebarkan informasi pelatihan dan kegiatan lain di BBPLK, dilakukan promosi dan Forum Jejaring Lembaga Pelatihan Kerja. Dalam melakukan pelatihan dan kegiatan lain, BBPLK juga melakukan kerjasama dengan mitra kerja perusahaan/industry, sehingga diharapkan seluruh peserta pelatihan setelah lulus, akan dapat langsung bekerja pada mitra kerja perusahaan/industry. Namun meski telah berdiri selama 45 tahun, BBPLK masih memiliki kekurangan seperti tidak memiliki instruktur dan sarana prasarana kejuruan Pariwisata, sarana dan Prasarana kejuruan bangunan kurang maksimal, promosi belum menjangkau daerah-daerah terpencil Sumatera Utara, dan Anggaran untuk meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan masih kurang. Dalam menyelenggarakan pelatihan, BBPLK menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar seperti kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah dalam pelaksanaan pelatihan di BBPLK medan, sertifikat yang dikeluarkan BBPLK belum memberi kepastian bagi para lulusan apakah dapat langsung diterima perusahaan atau tidak, adanya penghematan anggaran berdasar instruksi presiden (self blokir), perkembangan lembaga pelatihan swasta, terputusnya kerjasama dengan dunia industry bila program pelatihan tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, serta adanya ancaman hacker untuk memanfaatkan data pribadi calon peserta pelatihan yang terdaftar di Kios 3in1.

### **III. PERMASALAHAN**

Selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dimana dalam era globalisasi ini, khusus sejak tahun 2019 dan tahun berikutnya, pemerintah pusat memiliki program utama yaitu program pengembangan SDM dalam rangka percepatan peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Pemerintah melalui Kemnaker telah memfasilitasi masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan keterampilan (skilling), alih keterampilan (re-skilling), maupun



menambah keterampilan (up-skilling) di instansi pelatihan vokasi yakni di 305 BLK Pemerintah, 5.020 LPKS, 109 Lembaga Pelatihan K/L lain, 1.799 Training Center (TC) Industri, dan 1.113 BLK Komunitas.

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan merupakan unit pelaksanaan teknis (UPT) pusat dibidang pelatihan kerja dibawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. BBPLK Medan merupakan salah satu dari 5 BLK besar selain BBPLK Bekasi, Serang, Bandung dan BBPLK Semarang yang telah menerapkan program revitalisasi 3R (reorientasi, revitalisasi, dan rebranding) untuk memperkuat akses dan mutu pelatihan vokasi. BBPLK menyelenggarakan Pelatihan yang dibiayai Pemerintah dengan modul pelatihan bertaraf internasional. Persoalan di lapangan, meski BBPLK sebagai *engine* penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat yang sudah berdiri selama 45 tahun, ternyata masih ditemukan masalah yang perlu perhatian lebih lagi dan perlu koordinasi dengan pihak terkait lain sehingga setelah mengikuti pelatihan, para lulusan dapat langsung terserap di dunia kerja. BBPLK Medan yang telah berdiri selama 45 tahun diharapkan perlahan-lahan dapat meningkatkan kualitas dan mengikuti modernisasi baik sarana prasarana, kurikulum, SDM, instruktur, maupun pemilihan kejuruan yang sesuai kebutuhan global, sehingga menjadi BBPLK bertaraf internasional. Peningkatan BBPLK menuju internasional ini harus mendapat dukungan menyeluruh oleh pemerintah pusat terutama terkait anggaran yang tidak sedikit sehingga tidak mandeg ditengah jalan yang malah membuat seluruh fasilitas yang ada sebelumnya menjadi barang rongsokan. BBPLK Medan harus dapat mengejar ketertinggalan balai-balai pelatihan lainnya. Begitupun regulasi yang menyertai pelaksanaan pelatihan ini harus memberikan keleluasaan bagi seluruh pihak sehingga dapat mensukseskan penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat. Selain itu, harapannya agar masyarakat banyak yang mengikuti pelatihan di BBPLK dapat memiliki kompetensi yang cukup memadai menghadapi persaingan kerja di tengah jaman globalisasi. Melalui pengembangan BBPLK ini, pada akhirnya dapat menjawab kebutuhan industry terhadap SDM yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024.

#### **IV. PEMBAHASAN**

Tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja dan para undangan melakukan pertemuan di kantor BBPLK Medan antara lain kepala UPTD Lubuk Pakam, Kepala BLK UPTD Batu Bara dan Kepala BLK UPTD Pematang Siantar, Kepala Balai K3 Sumatera utara, pimpinan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Sumatera Utara, dan perwakilan dari asosiasi pengusaha yaitu APINDO dan KADIN dan serta seluruh

mitra kerja dan undangan menyampaikan masukan hal-hal terkait informasi dan evaluasi program penyelenggaraan pengembangan BBPLK Medan menuju Balai Pelatihan bertaraf internasional di provinsi Sumatera Utara. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

## **1. Paparan Disnaker Provinsi Sumatera Utara**

- a. peran, tanggungjawab, serta koordinasi dengan lintas instansi yang dilakukan Disnaker terkait program pengembangan BBPLK Medan  
Perannya: Mendukung penuh program kegiatan Pelatihan dari BBPLK  
Tanggungjawab: Melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut sesuai dengan Arahan dan Juknis yang diberikan oleh BBPLK  
Koordinasi: Sebelum Penyusunan Anggaran yang dilakukan oleh BBPLK selaku Pembina, yang mana Bagian Program melakukan Monitoring dan evaluasi ke UPT untuk melihat secara langsung kesiapan Workshop dan koordinasi ke UPT BLK tentang Program Pelatihan yang sangat diminati oleh Masyarakat yang ada daerah lokasi UPT BLK selaku binaan dari BBPLK
- b. Dukungan pemerintah daerah dalam upaya program pengembangan BBPLK menjadi Balai Pelatihan bertaraf internasional di provinsi Sumatera Utara, Perbaikan Gedung Kantor, Workshop (Fisik) dan perlengkapan sarana dan Prasarana berupa Peralatan Pelatihan dan pendukungnya.
- c. Mekanisme pelaksanaan program pengembangan BBPLK di Provinsi Sumatera Utara, termasuk koordinasi dengan BLK UPTD binaan di kabupaten/kota selaku Pembina adalah Koordinasi dan Konsultasi ke UPT. BLK tentang sarana dan prasarana serta program pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
- d. Permasalahan peningkatan yang dicapai dalam pelaksanaan program pengembangan BBPLK menjadi Balai Pelatihan internasional yang akan mendongkrak kualitas SDM di Provinsi Sumatera Utara. yaitu ketiadaan adanya perekrutan / Penambahan Tenaga Fungsional / Instruktur dalam beberapa tahun belakangan ini yang mengakibatkan kurangnya SDM untuk pelaksanaan Program Pelatihan dari BBPLK, dan sebagai solusinya UPT BLK bekerjasama dengan Lembaga Swasta atau LPK yang ada di Kabupaten dan Kota, dan memberdayakan para Alumni Pelatihan yang dianggap mampu untuk mengajar sesuai dengan Bidang keterampilannya, dengan dibekali untuk mengikut sertakan Para Instruktur yang di rekrut untuk mengikuti DIKlat Metodologi.

- e. Upaya pembenahan program pengembangan BBPLK di Provinsi Sumatera Utara ke depan selama ini sudah dilakukan yakni dengan akan mengusulkan penambahan ASN untuk tenaga Fungsional / Instruktur dan Non Fungsional di UPT BLK agar program BBPLK medan bisa berjalan dengan baik dengan adanya Tenaga Instruktur tersebut, karena yang menjadi permasalahan di UPT BLK adalah ketidak tersedianya Tenaga Instruktur yang ASN, dan untuk mengatasinya yakni seperti yang di jelaskan pada Point 5 di atas,

## 2. Paparan Disnaker Kota Medan

Alokasi anggaran BBPLK, jumlah peserta, jumlah lulusan dan yang telah terserap dalam lapangan kerja melalui program pengembangan BBPLK di Provinsi Sumatera Utara dalam 3 tahun terakhir:

No	Nama Kegiatan	Jlh Paket	Jlh Org
1	Sertifikasi Pelatihan Tata Kecantikan Kombinasi	4 Paket	64 Orang
2	Sertifikasi Pelatihan Teknik Sepeda Motor	1 Paket	16 Orang
3	Sertifikasi Pelatihan Teknik Komputer Jaringan	2 Paket	32 Orang
4	Sertifikasi Pelatihan SPA	1 Paket	16 Orang
5	Sertifikasi Pelatihan Teknik Mesin Pendingin	1 Paket	16 Orang

## 3. Paparan Kepala BBPLK Medan

DATA PESERTA DAN ALOKASI ANGGARAN BBPLK MEDAN DALAM 4 TAHUN TERAKHIR

---

## GRAFIK REALISASI KEUANGAN DAN FISIK BBPLK MEDAN (2015-2019)



Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPLK Medan Tahun 2019, maka berikut ini tabel capaian indikator kinerja kegiatan untuk sasaran strategis yang pertama yaitu Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi:

	2015	2016	2017	2018	2019
TARGET (org)	3.304	5.040	5.336	12.064	14.460
REALISASI (org)	3.304	4.868	6.273	11.984	14.380
%	100,00	96,59	117,56	99,47	99,45

Tabel target dan realisasi pelatihan di BBPLK Medan, BLK UPTD Binaan dan BLK Komunitas tahun 2020:

No	Jenis Pelatihan	Target (Org)	Realisasi (Org)
1	PBK BOARDING		
	KONSTRUKSI	48	48
	PARIWISATA	48	48
2	PBK NON BOARDING		
	KONSTRUKSI	160	160
	PARIWISATA	80	80

3	MTU	240	240
4	PBK TANGGAP COVID	176	176
5	BLK KOMUNITAS	1.216	544
6	UPTD BLK	2.672	
7	HYBRID LEARNING	160	160
8	PELATIHAN PEMBUATAN KONTEN ONLINE	16	16

Jumlah lulusan tahun 2017 adalah 6.273 orang, tahun 2018 adalah 11.984 orang, tahun 2019 adalah 14.380 orang, oleh karena itu jumlah lulusan selama 3 tahun terakhir adalah 32.637 orang. Terkait jumlah penyerapan tenaga kerja, saat ini belum bisa memperoleh data yang akurat dikarenakan sulitnya memonitor lulusan pelatihan. Kesulitan yang dihadapi diantaranya adalah nomer hp siswa yang tidak bisa dihubungi kembali.

Mekanisme pelaksanaan pelatihan kerja di BLK UPTD Binaan Propinsi Sumatera Utara dan Jambi adalah sebagai berikut :

1. BLK UPTD Binaan menyelenggarakan pelatihan berdasarkan target keuangan dan fisik yang tertuang di DIPA BBPLK Medan. Jenis pelatihan ini telah berdasarkan proposal dari BLK UPTD Binaan yang diusulkan ke Ditjen Binalattas melalui BBPLK Medan pada tahun sebelumnya. Jenis pelatihan yang diusulkan tentunya mempertimbangkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia di masing-masing BLK UPTD.
2. Sebelum pelaksanaan pelatihan, BBPLK Medan akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang diantaranya membahas prosedur pelaksanaan anggaran dan pelatihan. Selain itu juga membahas uji kompetensi/sertifikasi terhadap siswa pelatihan.
3. BBPLK Medan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke BLK UPTD Binaan untuk mengidentifikasi masalah dan rencana aksi penyelesaian masalah baik dari sisi keuangan maupun fisik pelatihan.
4. Laporan pelaksanaan pelatihan akan dikirimkan ke BBPLK Medan berikut juga berkas-berkas administrasi keuangan.

### **Dampak Pandemi Covid-19 pada sector ketenagakerjaan dan peran BBPLK**

Dalam kondisi pandemic covid-19 ini, dimana dampak nyata dalam bidang ketenagakerjaan sangat mendalam, antara lain, banyaknya pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan oleh

perusahaan, selain itu juga pembayaran upah dan THR yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini tidak lain disebabkan karena kelangsungan usaha yang mulai terancam berhenti beroperasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut untuk tahun-tahun mendatang, BBPLK Medan berupaya untuk mengakomodir para pekerja yang dirumahkan dengan cara menyelenggarakan program pelatihan yang diutamakan bagi para pekerja yang dirumahkan akibat pandemi covid 19. Selain itu, dalam rangka tetap mematuhi protokol kesehatan maka BBPLK Medan juga menyelenggarakan pelatihan dengan metode online yang dipadukan dengan offline class. Pelatihan ini dinamakan Hybrid Learning dan telah dilaksanakan di Balikpapan, Makasar, Palu, Surabaya, Manado, Batam, Belitung dan Tangerang Selatan. Siswa akan diberikan materi dasar/teori melalui metode online class, dan selanjutnya siswa akan praktek langsung (OJT) di hotel-hotel agar mereka dapat secara langsung menggunakan sarana prasarana yang tersedia dan dapat terbiasa menggunakan peralatan di dunia kerja.

### **Hambatan yang dihadapi BBPLK Medan serta solusinya.**

#### **Hambatan :**

1. Tersedianya lowongan kerja bagi siswa pelatihan namun tidak banyak yang mendaftar
2. Tidak semua alumni yang sudah bekerja, melaporkan dirinya ke BBPLK Medan
3. Pendaftaran penempatan kerja/penyerapan di pasar kerja belum maksimal karena banyak siswa yang sulit dihubungi setelah selesai pelatihan
4. Keterlambatan penerbitan sertifikasi kompetensi

#### **Solusi :**

1. Meningkatkan penyajian informasi pelatihan dan lowongan kerja melalui sosial media yaitu Facebook dan Instagram
2. Bekerjasama dengan pihak industri melalui FKLPI untuk memperoleh informasi jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga program pelatihan dapat didesain sesuai kebutuhan industri
3. Mendorong peserta pelatihan yang sudah lulus untuk melaporkan status kebekerjaan melalui WA group siswa
4. Melakukan penyediaan data yang lengkap ke BNSP

## **4. Paparan APINDO/KADIN**

Sebagai induk organisasi dunia usaha yang diatur melalui Undang – Undang Nomor 1 tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Kadin Sumatera Utara berupaya memberikan berbagai masukan dan informasi kepada BBPLK terkait kebutuhan pasar tenaga kerja, permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan sumber daya manusia, perkembangan

trend bisnis / usaha mendatang, kompetensi sumber daya manusia yang diharapkan, perkembangan teknologi yang dipergunakan oleh industri, persaingan usaha dan tenaga kerja baik nasional maupun internasional, yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk menjadi masukan konstruktif bagi BBPLK dalam mempersiapkan program pelatihan yang lebih berorientasi kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan demikian diharapkan lulusan pelatihan BBPLK akan lebih mudah diserap oleh kalangan dunia usaha dan industri.

Selain itu tentunya Kadin dalam berbagai kesempatan melakukan sosialisasi dan informasi tentang keberadaan BBPLK kepada dunia usaha dan industri di Sumatera Utara, sehingga fasilitas BBPLK dan lulusan pelatihannya bisa lebih optimal diserap oleh kalangan dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya.

Kerjasama Kadin dengan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan BBPLK menuju Balai Latihan bertaraf Internasional selama ini, sudah dilakukan pemerintah dengan mengakomodir berbagai masukan dari Kadin. Misalnya, dengan melakukan pembenahan dari sisi fasilitas dan sarana infrastruktur BBPLK untuk membuat kegiatan pelatihan lebih produktif dan berdaya saing. Melakukan program kegiatan yang melibatkan Kadin sebagai mitra strategis.

Mekanisme kerja sama program yang selama ini dilakukan seperti dilaksanakannya kegiatan Focus Group Discussion, Brainstorming, melibatkan industri yang sesuai dengan sektor bisnis program pelatihan untuk melakukan MoU dengan BBPLK Medan. Program kedepan diharapkan akan lebih banyak kegiatan sosialisasi dan kegiatan temu industri agar BBPLK Medan dapat berkomunikasi langsung dengan intensif dengan pelaku industri sehingga program pelatihan yang dilakukan oleh BBPLK Medan tetap mengikuti perkembangan pasar tenaga kerja dan para lulusan pelatihan bisa terserap lebih optimal. Pembenahan yang sudah dilakukan antara lain memberi masukan akan pengembangan sarana pelatihan, infrastuktur dan juga ketersediaan instruktur yang kompeten sesuai kebutuhan pelatihan. Disamping itu pembenahan dalam melakukan kajian bersama untuk perubahan kurikulum pelatihan yang tidak hanya mempersiapkan tenaga kerja terlatih dan kompeten tetapi juga menyiapkan para lulusan pelatihan tersebut menjadi pelaku wirausaha yang berjiwa entrepreneurship.

Koordinasi dilakukan oleh APINDO dan KADIN bersama dengan para stake holders terkait seperti pemerintah (Dinas Tenaga Kerja baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota), BLK yang ada di Sumatera Utara, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri, asosiasi sektoral yang terkait dengan bidang pelatihan BBPLK dan kalangan dunia usaha / dunia industri pada

umumnya di Sumatera Utara. Koordinasi tersebut bertujuan untuk membuat sinergi program yang saling menguatkan sehingga tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara dapat lebih kompeten dan terserap di dunia usaha / industri. Koordinasi yang sudah dilakukan oleh Kadin telah membuat keberadaan Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Provinsi Sumatera Utara lebih dikenal dan dipercaya dunia industri, sudah mulai ada peningkatan jalinan kemitraan yang lebih massif. Sehingga diharapkan BBPLK dapat mengeksplorasi dan mengakses semua potensi pengembangan kapasitas SDM dan tenaga kerja serta potensi kemitraan yang belum pernah ada sebelumnya. Koordinasi tersebut juga selain meningkatkan terjalannya kemitraan, juga telah meningkatkan komunikasi intensif dengan industri, asosiasi industri terkit, serta tenaga ahli / instruktur dalam pengembangan program pelatihan yang ada di BBPLK Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pertemuan yang telah dilakukan beberapa kali dengan KADIN bahkan juga dengan APINDO, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kerjasama di bidang evaluasi kesesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan DUDI
2. Kerjasama dalam proses seleksi calon peserta pelatihan dan penempatan pasca pelatihan
3. Kerjasama dalam penyediaan tenaga pelatihan/instruktur dari APINDI/DUDI
4. Kerjasama dalam praktek proses produksi baik di fasilitas BBPLK Medan maupun APINDO/DUDI
5. Kerjasama pelatihan “Soft Skill Management” di fasilitas APINDO

Permasalahan yang dihadapi dalam proses pengembangan BBPLK di Prop. Sumatera Utara terkait kerjasama dengan KADIN yaitu secara garis besar adalah keyakinan/kepercayaan DUDI terhadap lulusan BLK, baik BBPLK Medan maupun BLK UPTD di Provinsi Sumatera Utara lainnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mempromosikan dan mengajak lebih banyak anggota DUDI untuk mengenal dan melihat langsung kondisi BBPLK (khususnya BBPLK Medan) saat ini yang telah jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya, serta mengikutsertakan anggota APINDO dalam kegiatan pelatihan di BBPLK Medan.

Selain itu, Informasi dan sosialisasi rencana kegiatan pelatihan belum efektif, efisien dan tepat sasaran sampai kepada calon tenaga kerja, sekolah ataupun pencari kerja. Disamping itu dirasakan perlu juga informasi tersebut disampaikan kepada industri supaya bisa selaras program perekrutan calon peserta dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Sehingga output lulusan benar – benar bisa langsung ditempatkan baik magang maupun bekerja di industri.



Untuk itu perlu dibuat database yang up to date dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dan sejalan dengan program BBPLK. Khusus dikondisi pandemic covid saat ini perlu dipikirkan bersama pelatihan – pelatihan yang bersifat daring (online) dan penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan pelatihan yang bersifat offline.

**Masukan KADIN:**

- a. BBPLK Medan diharapkan lebih cepat bergerak mengikuti perubahan-perubahan yang ada, sehingga dapat mencetak peserta pelatihan yang terampil dan siap pakai
- b. Perlu dibuka kemungkinan pelaksanaan perekrutan oleh sektor swasta dan tidak harus melalui BBPLK Medan agar peserta dapat langsung terserap dilapangan kerja.
- c. Perlu memperkuat jiwa wirausaha kepada peserta pelatihan
- d. Perlu diperkuat pengembangan dan membuka peluang-peluang dunia usaha di desa, mengingat adanya MoU antara Kadin dengan kementerian desa di provinsi Sumatera Utara.

**5. Paparan FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN INDUSTRI (FKLPI)**

Kepengurusan FKLPI periode sekarang baru dibentuk berdasarkan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Nomor 1/1015/HK.03.01/X/2020 tentang Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dengan Industri daerah Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan Periode Tahun 2020 – 2023. Penyerapan peserta program pengembangan yang diserap oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri sebagian besar di sektor Perhotelan dan Konstruksi. Beberapa hotel dan industri pariwisata serta konstruksi telah membuat MOU dengan BBPLK Medan, misalnya Hotel Cordella, Hotel Santika, Harper Hotel, Grand City Hall Hotel, Cambridge Hotel, Alfaland, DreamARCH, Millenium Plaza, dan Asosiasi Ekspor dan Industri Kopi Indonesia (AEKI) dan lain lain sehingga ke depannya proses penempatan tenaga kerja dapat lebih terarah karena sesuai dengan permintaan dunia usaha dan dunia industri dan terdata dengan baik.

Dukungan FKLPI dalam pengembangan program pelatihan di BBPLK Medan sebagai berikut:

- a. membuat pertemuan-pertemuan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk mengetahui Kebutuhan Tenaga Kerja di DUDI.
- b. Secara rutin berkomonikasi dengan BBPLK dalam hal pengembangan program-program BBPLK.
- c. FKLPI Sumut juga berperan dalam hal pembentukan FKLPI Siantar dan Batubara, sesuai program tahun 2020.

- d. berperan aktif memberikan masukan-masukan kepada BBPLK Medan sesuai hasil komunikasi yang kami bangun dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
- e. membantu melakukan survey kebutuhan tenaga kerja di Sumatera Utara sebagai masukan pengembangan pelatihan BBPLK Medan

FKLPI Sumatera Utara sangat berperan dalam hal penyerapan Lulusan BBPLK Medan untuk ditempatkan di Dunia Usaha dan Dunia Industri. Karena selalu proaktif untuk menjalin hubungan melalui Coffee Morning dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Mengingat net working yang dimiliki FKLPI berupa jaringan pelatihan Internasional yang dapat berkolaborasi dengan BBPLK Kota Medan. FKLPI juga berupaya mengundang Investor- Investor Internasional untuk melakukan Investasi di Sumatera Utara sehingga penyerapan Pengembangan Pelatihan BBPLK semakin terserap untuk mengurangi pengangguran di Sumatera Utara. Net working yang ada di negara lain berupa membangun kemitraan supaya lulusan-lulusan pengembangan pelatihan di BBPLK dapat dikirimkan ke perusahaan-perusahaan negara lain.

## **6. Paparan BLK UPTD BINAAN BBPLK MEDAN**

### **6.1 BLK LUBUK PAKAM**

Sebagai BLK Binaan BBPLK medan kesiapan dan koordinasi BLK UPTD sangat bagus karena dalam tiga tahun terakhir UPTD.BLK Deli Serdang banyak melatih masyarakat Deli Serdang. Progress tersebut terlihat dari tahun ketahun semakin bertambah jumlah pelatihannya, hanya pada tahun 2020 dikarenakan COVID-19 jumlah paket pelatihan menurun.

#### **Data jumlah peserta pelatihan**

- a. Tahun 2018 sebanyak 25 (dua puluh lima) Paket dengan jumlah peserta 400 orang.
- b. Tahun 2019 sebanyak 40 (empat puluh) Paket dengan jumlah peserta 640 orang.
- c. Tahun 2020 sebanyak 12 (dua belas) Paket dengan jumlah peserta 192 orang.

Total Peserta selama tiga tahun sebanyak 1.232 (seribu dua ratus tiga puluh dua) orang, dari 1.232 orang yang dilaporkan sampai tanggal 18 November 2020 sudah memiliki usaha dan bekerja sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) Orang yang tersebar di instansi pemerintah dan dunia usaha lainnya, dengan alokasi anggaran untuk 3 (tiga) tahun tersebut sebesar kurang lebih Rp.4 Milyar. Kerjasama UPTD.BLK Deli Serdang dengan pihak terkait sampai

saat ini kami hanya memiliki MOU terkait pelatihan dengan LAPAS KLS II LUBUK PAKAM, LAPAS KLS I MEDAN dan BNN Provinsi SUMATERA UTARA, Proyeksi kebutuhan ke depan berharap paket yang diberikan sebanyak 40 (empat puluh) paket, karena semakin tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan terbatasnya jumlah pelatihan pada saat ini dikarenakan dampak COVID-19. Target dan capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 60 – 70 %.

## **6.2 BLK BATUBARA**

Upaya peningkatan jumlah peserta pelatihan BLK Kab. Batu Bara dalam 3 tahun terakhir: melalui penyebaran brosur pelatihan, berkunjung ke sekolah untuk sosialisasi program, membuat Facebook an. BLK Batu Bara, membuat konten Youtube kegiatan BLK Batu Bara, dan berkunjung ke kantor camat untuk sosialisasi program BLK. Kerjasama selama ini yang telah dilakukan yaitu kepada pihak swasta dan pemerintah seperti LPK, Kelurahan, Lembaga Pemasyarakatan (LP), dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

### **Proyeksi kebutuhan kedepan:**

- a. Akan menjalin banyak kerjasama dengan beberapa industri guna menggenjot infrastruktur yang ada di Kab. Batu Bara dan agar nantinya dapat menjadi contoh bagi BLK lainnya yang ada di Sumatera Utara yang dalam hal ini berada dalam binaan BBPLK Medan.
- b. Menjalinkan banyak kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri guna penyaluran alumni peserta pelatihan yang telah lulus dan memiliki sertifikat yang sesuai dengan standar kompetensi.

### **Alokasi anggaran UPTD BLK Kab. Batu Bara yang bersumber dari APBD dan APBN:**

#### **Anggaran APBD**

- a. Tahun 2018 berjumlah RP. 400.000.000
- b. Tahun 2019 berjumlah RP. 440.000.000
- c. Tahun 2020 berjumlah RP. 660.000.000

#### **Anggaran APBN**

- a. Tahun 2018 berjumlah RP. 735.576.000
- b. Tahun 2019 berjumlah RP. 2.835.711.000
- c. Tahun 2020 berjumlah RP. 1.011.640.000

### III TEMUAN-TEMUAN

Dari hasil pertemuan yang dilakukan, maka didapat beberapa temuan-temuan berdasarkan data yang disampaikan semua pihak, yaitu:

1. BBPLK Medan merupakan satu-satunya BLK milik pemerintah yang menjadi mitra pelaksana kartu prakerja yang ada 2 (dua) gelombang dimana gelombang ada 2.500 orang penerima kartu prakerja yang mendapatkan pelatihan dari berbagai daerah.
2. Tahun 2020, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di BBPLK Medan menurun, yaitu hanya 5.000 peserta dalam satu tahun. Sementara dahulu ketika pelaksanaan pelatihan dilakukan secara off line, peserta bisa mencapai 12.000 orang peserta. Bila melihat luas dan besarnya BBPLK Medan, jumlah 5.000 peserta yang mengikuti pelatihan dalam satu tahun itu terbilang kecil.
3. BBPLK Medan menerima seluruh peserta pelatihan baik dari Sumatera Utara sendiri, maupun peserta pelatihan dari provinsi lain dimana biaya pelatihan dan biaya lainnya sepenuhnya ditanggung oleh BBPLK Medan.
4. Banyak industry yang tidak mengetahui info tentang BBPLK, termasuk bagaimana sistem pembayaran biaya pelatihan. Oleh sebab itu perlu dilakukan sosialisasi lebih massif kepada industry.
5. Melihat dari kejuruan yang diadakan pada BBPLK Medan yaitu hanya pariwisata dan konstruksi, sangat disayangkan karena tidak ada pelatihan Bahasa Inggris, mengingat sektor pariwisata jelas membutuhkan pekerja yang paham dan dapat berbicara Bahasa Inggris, terlebih ketika pemerintah memiliki program pengembangan BBPLK Medan menjadi Balai Pelatihan bertaraf internasional.
6. Selain itu, provinsi Sumatera Utara di dominasi bidang pertanian khususnya perkebunan sawit, namun disayangkan juga ketika BBPLK Medan tidak mengadakan pelatihan terkait perkebunan sawit.
7. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, BBPLK Medan sangat bagus sebab melibatkan pihak swasta yaitu asosiasi industry mulai dari proses perekrutan, bidang pelatihan yang dibutuhkan, apa yang perlu dilakukan BBPLK Medan, termasuk kurikulum yang akan diberikan. Sehingga outputnya dapat menyerap peserta pelatihan pada lapangan kerja industry.
8. Keberadaan BBPLK sangat dibutuhkan saat ini, namun sosialisasi belum optimal dilakukan sehingga belum berjalan optimal.

9. BBPLK Medan bertujuan memberikan pelayanan komersil dimana dana yang terkumpul nantinya akan digunakan/dikembalikan untuk pengembangan Balai, namun terkendala karena belum ada payung hukum.

#### **IV. KESIMPULAN/REKOMENDASI**

1. Melihat tingginya minat dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelatihan di BBPLK Medan, maka sudah semestinya BBPLK Medan dikembangkan menjadi BBPLK Bertaraf Internasional. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI mendukung dilakukannya pengembangan BBPLK Medan menjadi Balai Pelatihan bertaraf Internasional.
2. Dalam menghadapi tuntutan pasar kerja saat ini, pembangunan SDM berkualitas menjadi suatu keharusan yang menjadi program prioritas nasional 2020-2024. Oleh sebab itu, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mengoptimalkan peran BBPLK menjadi Balai Pelatihan yang dapat berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja di Sumatera Utara.
3. Melihat kejuruan yang diadakan saat ini pada BBPLK Medan yaitu pariwisata dan konstruksi, serta upaya pengembangan BBPLK Medan menuju Balai Pelatihan bertaraf Internasional, maka Komisi IX DPR RI meminta agar BBPLK Medan lebih meningkatkan pelatihan Bahasa asing dalam kurikulum pelatihan yang dilakukan.
4. BBPLK Medan bertujuan memberikan pelayanan komersil dimana dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk pengembangan Balai, namun terkendala karena belum ada payung hukum. Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung pembentukan payung hukum pelayanan komersil yang akan dilakukan oleh BBPLK Medan.

#### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja spesifik ini disampaikan.

Jakarta, NOVEMBER 2020

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
KOMISI IX DPR RI KE PROVINSISUMATERA UTARA  
KETUA TIM,**

**Ttd**